



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 13492-13502

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Siti Solehah¹, Ade Budi Setiawan², Indra Cahya Kusuma³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Djuanda

c.2210712@unida.ac.id, ade.budi.setiawan@unida.ac.id, indra.cahya.k@unida.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana keterlibatan masyarakat, keterbukaan, dan dedikasi organisasi memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa-desa di Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini, yang menggunakan teknik kuantitatif, kuesioner dikirimkan kepada responden, termasuk pejabat desa dan penduduk di desa-desa di Kecamatan Cijeruk. Untuk memastikan setiap orang dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel penelitian, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan prosedur sampling probabilitas. Selain itu, dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 4.0, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode Partial Least Squares-based Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tidak terlalu dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat. Sementara itu, akuntabilitas pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh komitmen organisasi dan transparansi. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan pengelolaan dana desa yang akuntabel memerlukan tingkat komitmen yang tinggi dari pihak pemerintah desa serta transparansi informasi. Dengan memperkuat integritas pejabat desa, meningkatkan keterbukaan, serta mengoptimalkan pengawasan dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah desa dan pihak-pihak terkait dalam meningkatkan tata kelola keuangan desa.

Kata Kunci: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Transparansi.

1. Latar Belakang

Kuangan negara merupakan seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan milik negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Dalam praktiknya, keuangan negara mencakup berbagai aspek seperti penerimaan negara, pengeluaran negara, pengelolaan pajak, utang negara, hibah, aset negara, hingga pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keuangan negara memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi dasar utama bagi pemerintah dalam menjalankan pembangunan nasional, menyediakan pelayanan publik, menjaga stabilitas ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanpa pengelolaan keuangan negara yang baik, berbagai program pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, dan pelayanan publik lainnya tidak dapat berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, pemerintah harus mengelola keuangan negara secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan bertanggung jawab agar penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. Selain itu, pengelolaan keuangan negara juga harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, korupsi, maupun tindakan yang merugikan negara. Dalam sistem pemerintahan modern, keuangan negara tidak hanya dipandang sebagai urusan administrasi semata, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, menciptakan pemerataan pembangunan, mengurangi kemiskinan, dan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Dalam kehidupan bernegara, keuangan negara memiliki hubungan yang sangat erat dengan stabilitas politik, sosial, dan ekonomi suatu negara karena kondisi keuangan yang sehat akan memengaruhi kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sumber utama keuangan negara biasanya berasal dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, hasil pengelolaan sumber daya alam, keuntungan badan usaha milik negara, serta pinjaman atau hibah dari pihak lain. Seluruh penerimaan tersebut kemudian dialokasikan ke berbagai sektor sesuai prioritas pembangunan nasional. Pengelolaan keuangan negara yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah karena masyarakat melihat bahwa dana yang berasal dari rakyat digunakan kembali untuk

kepentingan rakyat. Sebaliknya, apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara, maka dapat menimbulkan berbagai masalah seperti defisit anggaran, meningkatnya utang negara, rendahnya kualitas pelayanan publik, hingga ketimpangan sosial. Oleh sebab itu, diperlukan pengawasan yang ketat dari lembaga negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran negara. Selain pengawasan, pemerintah juga harus mampu menyesuaikan kebijakan fiskal dengan kondisi ekonomi yang sedang terjadi, misalnya saat menghadapi krisis ekonomi, inflasi, atau bencana nasional. Dengan pengelolaan yang tepat, keuangan negara dapat menjadi instrumen penting untuk menciptakan kemajuan bangsa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menjaga keberlangsungan pembangunan nasional dalam jangka panjang.

Tabel 1 Sumber-Sumber Penerimaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 dan 2025

No	Nama Desa	Jumlah Sumber Dana 2024	Jumlah Sumber Dana 2025
1	Tajurhalang	4.209.313.775	4.508.354.640
2	Sukaharja	4.456.363.352	4.476.803.455
3	Palasari	4.630.266.175	4.638.529.366
4	Tanjungsari	3.775.886.505	4.001.689.346
5	Cibalung	4.805.127.420	4.790.070.754
6	Cipicung	5.144.872.036	5.102.033.752
7	Cijeruk	4.451.897.466	4.138.588.255
8	Cipelang	4.620.036.501	4.815.836.868
9	Warungmenteng	3.841.966.174	3.861.069.278

Sumber: Kecamatan Cijeruk 2025

Data tersebut menunjukkan bahwa setiap desa menerima dana dalam jumlah besar sehingga memerlukan pengelolaan yang cermat untuk mencegah penyimpangan dan memastikan pembangunan berjalan optimal. Menurut Pemerintah dalam negeri No.20 Thn. 2018, penyelenggaraan anggaran desa meliputi tahapan persiapan, implementasi, tata usaha keuangan, penyampaian, serta tanggung jawab anggaran yang dilaksanakan berdasarkan prinsip Keterbukaan, tanggung jawab, partisipatif, serta ketaatan dalam pelaksanaan anggaran. Aspek yang mempengaruhi mewujudkan Tanggungjawab pengurusan DD adalah peran serta masyarakat. Keterlibatan masyarakat memiliki peranan strategis dalam menjamin pemanfaatan anggaran dilaksanakan berdasarkan prioritas kebutuhan serta prioritas pembangunan desa. Andirfa et al. (2023) menyatakan bahwa meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat akan memperbesar potensi keberhasilan pembangunan desa. Selain itu, keikutsertaan masyarakat sekaligus menjadi bentuk pengawasan publik yang dapat mendorong pengurusan DD agar berjalan secara terbuka dan tanggungjawab. Namun, beberapa penelitian memberikan hasil yang berbeda. Penelitian Ishardiyanti, Mahmud, dan Mauzu (2025), Fajri et.al (2021), Irma (2022), Anugrah, Prabowo, dan Wardani (2021), serta Jenifer dan Sagala (2025) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat berpengaruh terhadap tata kelola Dana Desa. Sebaliknya, Saragih dan Alpi (2023) serta Yasir dan Munawaroh (2023) Penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Selain keikutsertaan, transparansi juga menjadi salah satu aspek penting pada tatakelola anggaran dana. Penyebaran informasi mencerminkan kemudahan pemerintah desa dalam menyediakan kemudahan akses informasi bagi masyarakat terkait proses maupun hasil pengelolaan keuangan desa. Menurut Novaria dan Nurjannah (2024), transparansi membuka akses informasi serta keterbukaan pengambilan keputusan dilaksanakan secara transparan sehingga informasi yang berkaitan dengan keputusan tersebut dapat diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan, sehingga mampu meningkatkan rasa percaya publik kepada pemerintah desa. Sejumlah penelitian, seperti yang dilakukan oleh Saputra dkk. (2024), Rahmawati dkk. (2024), dan Pribadi (2025), membuktikan Temuan penelitian membuktikan adanya pengaruh signifikan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Akan tetapi, hasil berbeda ditemukan dalam penemuan ilmiah Anggeli dan Andajani (2024) serta Making dan Handayani (2021) yang menyatakan Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa transparansi bukanlah faktor yang secara signifikan mengganggu pengelolaan Dana Desa.

Disamping transparansi, komitmen organisasi aparatur desa juga menjadi aspek yang berperan dalam mewujudkan akuntabilitas. Komitmen organisasi menggambarkan tingkat loyalitas, tanggung jawab, dan dedikasi aparatur desa dalam mencapai tujuan organisasi. Mada (2017) menyatakan bahwa pekerja desa yang menunjukkan komitmen yang kuat terhadap organisasi tinggi cenderung menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas sehingga Tingginya komitmen organisasi yang dimiliki pegawai desa berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan Dana Desa. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Jenifer dan Sagala (2025), Pribadi (2025), serta Sarah et al. (2020) menunjukkan Temuan penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Namun demikian, penelitian Anugrah, Prabowo, dan

Wardani (2021) serta Jati (2021) menemukan Temuan penelitian mengindikasikan bahwa komitmen organisasi bukan merupakan faktor yang signifikan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu serta kondisi pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Cijeruk, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat, transparansi, dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini memakai metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif guna mengkaji pengaruh partisipasi masyarakat, transparansi, dan komitmen organisasi mengenai akuntabilitas pengelolaan Anggaran. Populasi penelitian meliputi masyarakat dan lembaga masyarakat warga Kecamatan Cijeruk, Kab. Bogor, dengan jumlah penduduk sebanyak 99.996 jiwa berdasarkan data Disdukcapil Kabupaten Bogor thn 2024. Sampel penelitian terdiri atas beberapa desa di Kecamatan Cijeruk yang dipilih untuk mengidentifikasi hubungan antarvariabel dalam penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik probabilitas sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2013:81). Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif sehingga Analisis data dalam penelitian menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan data dan statistik inferensial untuk menguji hipotesis penelitian (Sugiyono, 2023). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Partial Least Square (PLS) dengan bantuan aplikasi SmartPLS versi 4.0. PLS merupakan salah satu pendekatan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis varians (variance-based SEM) digunakan untuk menganalisis hubungan kausal antarvariabel laten secara simultan dalam penelitian ini. Menurut Ghozali (2014), metode SEM mampu menghubungkan teori dan data secara lebih komprehensif dibandingkan teknik multivariat lainnya, seperti analisis faktor, regresi berganda, dan analisis diskriminan. Metode PLS digunakan berdasarkan karakteristik model penelitian yang melibatkan sejumlah variabel laten, yaitu partisipasi masyarakat, transparansi, komitmen organisasi, dan akuntabilitas yang dibentuk oleh indikator reflektif. Model reflektif mengasumsikan bahwa variabel laten memengaruhi indikatornya sehingga hubungan yang terbentuk bersifat kausal dari konstruk menuju indikator. Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan indikator berulang atau model komponen hierarki untuk menguji hubungan antar konstruk secara simultan menggunakan algoritma standar PLS. Selain itu, Metode PLS tidak mensyaratkan asumsi distribusi multivariat normal serta tetap dapat digunakan pada ukuran sampel yang relatif kecil, sehingga sesuai untuk penelitian dengan model kompleks.

3. Hasil dan Diskusi

Karakteristik responden dalam penelitian ini mencakup 206 orang yang berasal dari unsur masyarakat desa dan aparatur desa di Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Berdasarkan karakteristik usia, mayoritas responden berada pada kelompok usia 20–30 tahun dengan jumlah 97 responden (46,7%). Selanjutnya, responden berusia 30–40 tahun berjumlah 56 orang (27,2%), usia 40–50 tahun sebanyak 37 orang (18%), usia 50–60 tahun sebanyak 14 orang (6,3%), dan usia 60–65 tahun sebanyak 2 orang (1%). Sementara itu, berdasarkan jenis kelamin, responden laki-laki mendominasi dengan jumlah 118 orang (57,3%), sedangkan responden perempuan berjumlah 88 orang (42,7%)

Tabel 2 Karakteristik Responden

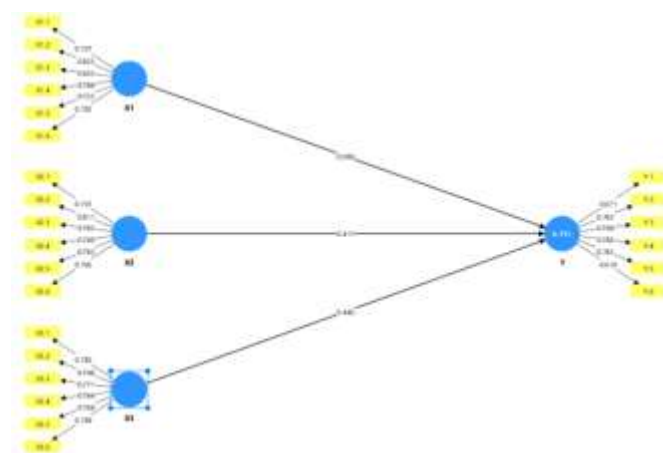
Karakteristik Respponden	Jumlah	Presentase
Usia		
20 – 30 Th	97	46,7%
30 – 40 Th	56	27,2%
40 – 50 Th	37	18%
50 – 60 Th	14	6,3%
60 – 65 Th	2	1%
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	88	57,3%
Perempuan	118	42,7%
Pendidikan Terakhir		
SD	27	13,1%
SMP	33	16%
SMA	93	45,1%
D1/D2/D3	8	3,9%
S1/S2/S3	45	21,8%
Status Penduduk		
Masyarakat Desa	136	66%
Aparatur Desa	70	34%

Sumber: dikembangkan untuk penelitian ini, (2026)

Ditinjau Dilihat dari tingkat pendidikan terakhir, sebagian besar responden berpendidikan SMA sebanyak 93 orang (45,1%), diikuti pendidikan S1–S3 sebanyak 45 orang (21,8%), SMP sebanyak 33 orang (16%), SD sebanyak 27 orang (13,1%), dan D1–D3 sebanyak 8 orang (3,9%). Berdasarkan status penduduk, mayoritas responden merupakan masyarakat desa sebanyak 136 orang (66%), sedangkan aparatur desa sebanyak 70 orang (34%). subtitle.

3.1. Meansurement Model (Outer Model)

Evaluasi outer model dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian yang digunakan. Hasil pengujian validitas konvergen menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki nilai loading factor di atas 0,50 sehingga memenuhi kriteria validitas dan dinyatakan layak digunakan dalam penelitian (Ghozali, 2014). Selain itu, hasil pengujian Average Variance Extracted (AVE) menunjukkan nilai AVE semua konstruk di atas 0,50, yaitu partisipasi masyarakat sebesar 0,555, transparansi sebesar 0,580, komitmen organisasi sebesar 0,593, dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa sebesar 0,525. Dengan demikian, seluruh konstruk memenuhi kriteria validitas konvergen (Hair & Alamer, 2022).



Sumber: Output SmartPLS (2026)

Gambar 1. Hasil Evaluasi Outer Model

3.2. Convergent Validity

Validitas konvergen digunakan untuk mengukur sejauh mana indikator mampu merepresentasikan konstruk laten yang diwakilinya. Pengujian validitas konvergen dilakukan dengan melihat nilai loading factor pada masing-masing indikator penelitian. Menurut Ghozali (2014), suatu indikator dikatakan memenuhi validitas konvergen apabila memiliki nilai loading factor $\geq 0,70$.

Variabel	Indikator	Loading Factor	Rule Of Thumb
Partisipasi Masyarakat	PM1	0.727	0.5
	PM2	0.825	0.5
	PM3	0.663	0.5
	PM4	0.788	0.5
	PM5	0.755	0.5
	PM6	0.702	0.5
Transparansi	T1	0.737	0.5
	T2	0.811	0.5
	T3	0.782	0.5
	T4	0.749	0.5
	T5	0.783	0.5
	T6	0.705	0.5
Komitmen Organisasi	KO1	0.782	0.5
	KO2	0.748	0.5
	KO3	0.771	0.5
	KO4	0.784	0.5
	KO5	0.768	0.5
	KO6	0.769	0.5

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.9883>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

	APDD1	0.671	0.5
Akuntabilitas	APDD2	0.762	0.5
Pengelolaan	APDD3	0.768	0.5
Dana Desa	APDD4	0.780	0.5
	APDD5	0.743	0.5
	APDD6	0.610	0.5

Sumber: Dikembangkan untuk penelitian 2026

Berdasarkan data pada Tabel 3, seluruh item pernyataan mempunyai nilai loading factor lebih 0,5. Hasil tersebut membuktikan bahwa setiap indikator dalam penelitian sudah memenuhi kriteria *convergent validity* sehingga dikatakan valid untuk digunakan dalam pengukuran variabel penelitian.

3.3. AVE (Average Variance Extracted)

Penilaian Pengujian validitas konvergen juga dilakukan melalui Average Variance Extracted (AVE). Suatu konstruk dinyatakan memenuhi validitas konvergen apabila memiliki nilai AVE lebih besar dari 0,50. Hal tersebut menunjukkan bahwa konstruk laten mampu menjelaskan lebih dari 50% varians indikatornya, sehingga memenuhi kriteria validitas konvergen. dari indikator-indikator yang digunakan dalam pengukurannya (Hair & Alamer, 2022). Adapun hasil evaluasi nilai AVE dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 Hasil Pengujian Average Variance Extracted (AVE)

Konstruk	Outer Loadings
Partisipasi Masyarakat (X1)	0.555
Transparansi (X2)	0.580
Komitmen Organisasi (X3)	0.593
Akuntabilitas Pengelolaan Dana desa (Y)	0.525

Sumber: Dikembangkan untuk penelitian (2026)

Berdasarkan data pada Tabel 4, nilai AVE seluruh konstruk penelitian berada pada rentang 0,525 hingga 0,593. Nilai tersebut telah melampaui batas minim yang direkomendasikan, yaitu sebesar 0,50 (Hair & Alamer, 2022). Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dalam model penelitian telah memenuhi kriteria validitas konvergen.

3.4 Composite Reliability

Composite reliability dipakai untuk mengevaluasi konsistensi konstruk reflektif internal, yaitu seberapa besar indikator penyusun bisa merefleksikan konstruk yang diukur sebagai satu kesatuan konsep yang bersifat unidimensional. Menurut Hair et al. (2022), Konstruk dikatakan reliabel apabila nilai *Composite Reliability* lebih besar dari 0,70. Hasil pengujian composite reliability pada penelitian ini disajikan pada Tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 5 Evaluasi Composite Reliability

	Composit Reliability	Critical Value
Partisipasi	0.882	>0.7
Transparansi	0.892	>0.7
Komitmen	0.897	>0.7
Akuntabilitas	0.868	>0.7

Sumber: Output SmartPLS, 2026

Merujuk pada Tabel 5, seluruh konstruk penelitian konstruk tersebut menunjukkan nilai *Composite Reliability* di atas ambang batas 0,70 sesuai dengan rekomendasi Hair et al. (2022). Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh konstruksi dalam penelitian telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. *internal consistency reliability*. Dengan demikianSeluruh indikator yang digunakan secara konsisten mampu merepresentasikan variabel penelitian. Dengan demikian, instrumen penelitian dinyatakan memiliki tingkat reliabilitas yang baik sehingga layak digunakan pada tahap selanjutnya.

3.5 Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha merupakan metode pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat konsistensi internal suatu konstruksi penelitian, khususnya pada konstruk yang tersusun atas beberapa dimensi atau indikator. Suatu konstruk dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai Alpha Cronbach lebih tinggi daripad aambang batas kritis sebesar 0,70 Hair et al. (2022). Tabel Gambar 6 menampilkan hasil temuan *Cronbach 's Alpha* untuk penelitian ini sebagai berikut.

Tabel 6 Composite Reliability

	Composit Reliability	Critical Value
Partisipasi	0.838	>0.7

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.9883>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Transparansi	0.855	>0.7
Komitmen	0.863	>0.7
Akuntabilitas	0.818	>0.7

Sumber: Output SmartPLS, 2026

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 6, Setiap konstruk penelitian memiliki skor *Alpha Cronbach* lebih besar dari 0,70 . Temuan ini menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki tingkat konsistensi internal yang tinggi dan memenuhi persyaratan keandalan.

3.6 Analisis *Inner Model* (Structural Model)

Untuk menilai hubungan antar konstruk model penelitian , dilakukan analisis model internal. Evaluasi ini dapat dilihat melalui persentase variance yang mampu dijelaskan oleh model, yaitu dengan menilai kontribusi nilai R-Square (R^2) pada konstruk dependen, evaluasi substantif melalui nilai f-square (f^2), serta pengujian predictive relevance menggunakan Stone-Geisser Q-Square (Q^2). Selain itu, analisis inner model juga mencakup evaluasi estimasi path coefficients yang dibentuk berdasarkan model penelitian untuk menguji hipotesis yang diajukan (Ghozali, 2014). Dalam model struktural , kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen dinilai menggunakan koefisien determinasi (R^2). Nilai R^2 ditunjukkan gambar berikut dalam tabel 7.

Tabel 7 Evaluasi R-Square (R^2)

Konstruk Dependen	R-Square	Critical Value	Kesimpulan
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0.731	“kuat” apabila $R^2 > 0,75$; “moderat” apabila $R^2 > 0,50$; “lemah” apabila $R^2 > 0,25$	Moderat

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SmartPLS, 2026.

Berdasarkan Tabel 7, didapat nilai R-Square (R^2) pada variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebesar 0,731. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebesar 73,1% variasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dapat dijelaskan oleh variabel Partisipasi Masyarakat, Transparansi, dan Komitmen Organisasi, sementara variabel yang tidak termasuk dalam model penelitian tersebut memiliki dampak pada 26,9 % Mengacu pada kriteria yang dikemukakan oleh Ghozali (2014), nilai R^2 sebesar 0,731 berada pada kategori moderat karena terletak pada rentang 0,50–0,75. Hasilnya , model struktural studi ini berhasil menggambarkan dan memprediksi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

3.7 Evaluasi *F-Square* (f^2)

Evaluasi *f-square* (f^2) dalam PLS-SEM digunakan dalam model struktural untuk mengukur seberapa besar pengaruh masing-masing variabel eksternal terhadap variabel endogen. nilai R-Square pada variabel dependen (Hair et al., 2022). Menurut Cohen (1988), Suatu efek dianggap lemah jika nilai f^2 - nya 0,02 , sedang jika 0,15 , dan kuat jika 0,35 . Oleh karena itu, pengujian f-square Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil uji F^2 ditampilkan di tabel 8.

Tabel 8 Evaluasi *F-Square* (f^2)

Konstruk Dependen	R-Square	Critical Value	Kesimpulan
Partisipasi Masyarakat → Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0.013	“kuat” jika $f^2 > 0,02$;	Lemah
Transparansi → Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0.235	“moderat” jika $f^2 > 0,15$;	Moderat
Komitmen Organisasi → Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0.385	“lemah” jika $f^2 > 0,35$	Kuat

Sumber : Output SmartPLS, 2026

Berdasarkan Tabel 8, Variabel Partisipasi Masyarakat memiliki nilai F^2 sebesar 0,013 , yang berada di bawah 0,02 dan termasuk dalam kategori pengaruh lemah. Temuan menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Variabel Transparansi memperoleh nilai f^2 sebesar 0,235 yang berada pada rentang 0,15 hingga 0,35 sehingga dikategorikan sebagai pengaruh moderat. Dengan demikian, Transparansi memiliki kontribusi pengaruh yang cukup terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sementara itu, variabel Komitmen Organisasi memiliki nilai f^2 sebesar 0,385 yang berada di atas 0,35 sehingga termasuk dalam kategori pengaruh kuat. Hasil ini menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi memberikan kontribusi pengaruh yang besar terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Desa.

3.8 Analisis Nilai Q^2 (Q²)

PLS - Predict SmartPLS digunakan untuk menilai kinerja prediksi model dalam prediksi investigasi ini. Menurut Hair et al. (2022), menyatakan bahwa PLS-Predict menggunakan nilai Q^2 yang diantisipasi untuk variabel endogen untuk mengevaluasi kegunaan prediktif suatu model. Jika nilainya lebih besar dari 0, model tersebut dianggap memiliki daya prediksi. Kekuatan prediksi ditunjukkan oleh nilai Q^2 sebesar 0,02, kekuatan prediksi sedang oleh 0,15, dan kekuatan prediksi tinggi oleh 0,35. Adapun hasil pengujian Q^2 dalam penelitian ini pada Tabel 9

Tabel 9 Hasil Pengujian Q^2 -Square			
Konstruk Dependen	Q^2 Predict	RMSE	MAE
Y (Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa)	0.711	0.545	0.388

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SmartPLS, 2026

Berdasarkan hasil output PLS-Predict pada Tabel 9, diperoleh nilai Q^2 prediktif Nilai 0,711 lebih tinggi dari kriteria 0,35 dan karenanya termasuk dalam kelompok relevansi prediktif tinggi menurut kriteria yang dikemukakan oleh Hair et al. (2022). Temuan menunjukkan bahwa nilai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dapat dijelaskan oleh model penelitian dengan tingkat daya prediksi yang tinggi.

3.9 Evaluasi Estimasi *Path Coefficients*

Untuk mengetahui korelasi antar variabel, metodologi bootstrapping nonparametrik dapat digunakan untuk mengevaluasi estimasi koefisien jalur dalam metode PLS-SEM dalam model penelitian. Dalam pengujian hipotesis, keputusan dapat dibuat berdasarkan pemeriksaan estimasi koefisien jalur. Prosedur *bootstrapping* menghasilkan t-values untuk bobot indikator serta parameter model lainnya. Untuk menilai apakah koefisien tersebut signifikan secara statistik, t-values dibandingkan critical values dari distribusi normal standar. Kriteria yang digunakan dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini yaitu hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai t-statistic > dari t-tabel sebesar 1,96 dan nilai signifikansi (p-values) < dari 0,05. Sebaliknya, hipotesis dinyatakan ditolak apabila nilai t-statistic berada di bawah 1,96 serta nilai p-values lebih besar dari 0,05. Berikut ini adalah tabel hasil uji hipotesis yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 10 Hasil Pengujian <i>Path Coefficients</i>					
Konstruk Dependen				Original Sample	Sample Mean
				Standard Deviation	t-statistic
Partisipasi Masyarakat → Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0.086	0.097	0.069	1.244	0.213
Transparansi → Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0.417	0.411	0.91	4.572	0.000
Komitmen Organisasi → Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0.466	0.444	0.068	6.516	0.000

Sumber : Output SmartPLS, 2026

Berdasarkan estimasi *path coefficients* diketahui bahwa hipotesis:

- Koefisien jalur untuk hipotesis pertama ditentukan sebesar 0,086 berdasarkan hasil analisis data, yang menunjukkan korelasi positif antara Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa. Namun, Hasil pengujian menunjukkan nilai t-statistik sebesar 1,244, yang kurang dari 1,96, dan nilai p-value sebesar 0,213, yang lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan anggaran desa tidak berpengaruh secara signifikan oleh partisipasi masyarakat.
- Koefisien jalur untuk hipotesis kedua ditentukan sebesar 0,417 berdasarkan hasil analisis data, yang menunjukkan korelasi yang baik antara akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Hasil pengujian menunjukkan nilai t-statistik sebesar 4,572, yang lebih tinggi dari 1,96, dan nilai p sebesar 0,000, yang kurang dari 0,05. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa secara signifikan dan positif mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan anggaran desa.
- Koefisien jalur untuk hipotesis ketiga ditentukan sebesar 0,466 berdasarkan hasil analisis data, yang menunjukkan adanya korelasi positif antara Komitmen Organisasi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa. Hasil temuan menunjukkan t-statistik sebesar 6,516, yang lebih tinggi dari 1,96, dan nilai p-value sebesar 0,000, yang kurang dari 0,05. Oleh karena itu, bisa dibilang bahwa komitmen organisasi secara signifikan dan positif mempengaruhi tanggung jawab pengelolaan dana desa.

Pembahasan Hasil Penelitian

Tujuan dari pembahasan temuan penelitian ini adalah untuk menafsirkan hasil pengujian hipotesis berdasarkan analisis koefisien jalur (direct effect) pada model struktural. Selain itu, penelitian tersebut juga membandingkan temuan penelitian dengan temuan investigasi sebelumnya dan menghubungkannya dengan teori-teori yang digunakan

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Cijeruk

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan anggaran desa di Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, tidak terpengaruh secara signifikan oleh keterlibatan masyarakat. Hasil tersebut ditunjukkan oleh Statistik t sebesar 1,244, yang kurang dari 1,96, dan nilai p sebesar 0,213, yang lebih besar dari 0,05, menunjukkan temuan ini. Hasil ini menyiratkan bahwa meskipun tingkat partisipasi masyarakat tergolong tinggi, keterlibatan tersebut belum mampu menjadi faktor utama dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Secara teoritis, keterlibatan publik dapat mendorong akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan dana Desa. Namun, dalam praktiknya, keterlibatan masyarakat belum berjalan secara optimal karena masih bersifat formalitas, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terkait pengelolaan Dana Desa, serta minimnya keterlibatan aktif dalam proses pengawasan. Kondisi tersebut menyebabkan keterlibatan masyarakat belum secara signifikan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.

Apabila dikaitkan dengan *Stewardship Theory* Temuan studi menunjukkan bahwa otoritas desa memiliki dampak yang lebih besar terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. sebagai steward yang memiliki tanggung jawab moral dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Faktor internal, seperti integritas, tanggung jawab, dan komitmen aparatur desa. Oleh karena itu, meningkatkan kemampuan dan dedikasi para pejabat desa sama pentingnya dengan keterlibatan masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.

Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Cijeruk

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Temuan tersebut dibuktikan melalui nilai t-statistic sebesar 4,572 yang lebih besar dari 1,96 serta nilai p-value sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi yang diterapkan pemerintah desa, maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Dalam pelaksanaannya, transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi mengenai laporan keuangan, publikasi penggunaan anggaran, serta kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Keterbukaan tersebut mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa. Dengan adanya akses informasi yang jelas dan mudah diperoleh, masyarakat dapat mengetahui serta memantau proses penggunaan anggaran desa secara lebih efektif. Jika dikaitkan dengan *Stewardship Theory*, aparatur desa sebagai steward memiliki tanggung jawab moral untuk mengelola sumber daya secara amanah demi kepentingan masyarakat. Transparansi menjadi bentuk implementasi tanggung jawab tersebut melalui penyampaian informasi yang terbuka, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penerapan transparansi yang baik akan mendorong peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.

Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Cijeruk

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh komitmen organisasi. di Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Temuan tersebut ditunjukkan oleh nilai t-statistic sebesar 6,516 yang lebih besar dari 1,96 serta nilai p-value sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi komitmen organisasi yang dimiliki aparatur desa, maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Komitmen organisasi tercermin dari kesungguhan aparatur desa dalam melaksanakan tugas, loyalitas terhadap tujuan organisasi, serta tanggung jawab dalam mengelola Dana Desa secara optimal. Aparatur desa yang memiliki komitmen tinggi cenderung bekerja secara profesional, menjaga integritas, serta memastikan bahwa penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komitmen organisasi memiliki peranan penting dalam mendukung terciptanya tata kelola keuangan desa yang akuntabel. Berdasarkan perspektif *Stewardship Theory*, aparatur desa sebagai steward memiliki dorongan intrinsik untuk bertindak demi kepentingan organisasi dan masyarakat. Komitmen organisasi menjadi bentuk dedikasi, tanggung jawab, serta kesadaran moral aparatur desa dalam mengelola sumber daya yang dimiliki desa. Oleh karena itu, semakin tinggi komitmen organisasi aparatur desa, maka semakin kuat pula penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.

Selain itu, hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan Dana Desa tidak hanya bergantung pada tingginya tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan musyawarah atau forum desa, tetapi lebih

pada kualitas partisipasi yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri. Dalam banyak kasus, masyarakat hadir dalam kegiatan desa hanya untuk memenuhi undangan tanpa benar-benar memahami substansi pembahasan mengenai anggaran, perencanaan program, maupun mekanisme pengawasan penggunaan Dana Desa. Kondisi ini menyebabkan partisipasi masyarakat cenderung bersifat pasif dan belum mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa. Rendahnya literasi masyarakat terkait administrasi pemerintahan desa, laporan keuangan, serta prosedur pengelolaan Dana Desa juga menjadi faktor penghambat dalam menciptakan pengawasan publik yang efektif. Masyarakat sering kali menyerahkan sepenuhnya urusan pengelolaan anggaran kepada aparat desa karena menganggap hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah desa semata. Akibatnya, kontrol sosial dari masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa menjadi kurang maksimal. Padahal, dalam sistem pemerintahan yang baik, keterlibatan masyarakat tidak hanya sebatas menghadiri rapat, tetapi juga mencakup kemampuan memberikan kritik, saran, pengawasan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan desa agar penggunaan anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip transparansi.

Di sisi lain, aparat desa memiliki posisi yang sangat strategis dalam menentukan tingkat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa karena mereka merupakan pihak yang secara langsung bertanggung jawab terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban anggaran desa. Berdasarkan Stewardship Theory, aparat desa dipandang sebagai pihak yang memiliki amanah untuk mengelola sumber daya publik demi kepentingan masyarakat, sehingga keberhasilan pengelolaan Dana Desa sangat dipengaruhi oleh kualitas moral, integritas, dan profesionalisme aparat desa itu sendiri. Aparatur desa yang memiliki komitmen tinggi terhadap pelayanan publik akan cenderung menjalankan tugas secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab meskipun pengawasan masyarakat tidak terlalu kuat. Sebaliknya, apabila aparat desa memiliki integritas yang rendah, maka tingginya partisipasi masyarakat sekalipun belum tentu mampu mencegah terjadinya penyimpangan anggaran. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparat desa melalui pelatihan pengelolaan keuangan, pemahaman regulasi, penguatan etika pemerintahan, serta peningkatan kompetensi administrasi menjadi hal yang sangat penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Dengan adanya aparat desa yang profesional dan berintegritas, pengelolaan Dana Desa dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, temuan penelitian ini juga mengindikasikan bahwa sistem pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa perlu diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga pengawas lainnya. Pengawasan tidak dapat hanya mengandalkan satu pihak karena pengelolaan Dana Desa melibatkan jumlah anggaran yang cukup besar dan memiliki risiko penyalahgunaan apabila tidak diawasi secara optimal. Pemerintah desa perlu menciptakan mekanisme transparansi yang lebih terbuka, misalnya dengan mempublikasikan laporan penggunaan Dana Desa secara rutin melalui papan informasi, media sosial desa, maupun forum masyarakat agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi terkait anggaran desa. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam pengawasan Dana Desa juga perlu ditingkatkan agar masyarakat memiliki keberanian dan kemampuan untuk terlibat aktif dalam mengawasi jalannya pembangunan desa. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), inspektorat daerah, serta lembaga pengawas lainnya juga harus dioptimalkan sebagai bentuk pengawasan eksternal terhadap pengelolaan anggaran desa. Dengan adanya sinergi antara pengawasan internal dan eksternal, maka potensi terjadinya penyimpangan dapat diminimalkan dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dapat meningkat secara lebih efektif.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Partisipasi masyarakat memang penting dalam menciptakan pemerintahan desa yang demokratis dan transparan, namun partisipasi tersebut harus disertai dengan pemahaman, kesadaran, serta keterlibatan aktif dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa agar mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas. Di sisi lain, aparat desa sebagai pengelola utama Dana Desa harus memiliki integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat dan negara. Oleh karena itu, upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tidak cukup hanya dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi juga harus diiringi dengan penguatan kapasitas aparat desa, peningkatan sistem transparansi, serta optimalisasi mekanisme pengawasan. Dengan langkah-langkah tersebut, pengelolaan Dana Desa diharapkan dapat berjalan secara lebih akuntabel, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat sehingga tujuan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan, pengujian, dan analisis data mengenai pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi, dan Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Cijeruk,

Kabupaten Bogor, dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hasil tersebut menunjukkan bahwa meskipun masyarakat telah terlibat dalam berbagai kegiatan desa, partisipasi yang dilakukan masih cenderung bersifat formalitas dan belum disertai keterlibatan aktif dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa. Kondisi ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat belum menjadi faktor utama dalam mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab. Di sisi lain, Transparansi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat keterbukaan informasi yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat, maka semakin baik pula tingkat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Transparansi yang diwujudkan melalui penyampaian laporan keuangan dan informasi penggunaan anggaran secara jelas, terbuka, dan mudah diakses mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung terciptanya tata kelola Dana Desa yang lebih bertanggung jawab. Selain itu, Komitmen Organisasi juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi komitmen aparatur desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maka semakin baik pula tingkat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Komitmen organisasi tercermin dari kesungguhan, loyalitas, integritas, dan tanggung jawab aparatur desa dalam mengelola Dana Desa guna mencapai tujuan organisasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Referensi

1. Abdu, A. A., Chambers, L. M., Mulligan, D. K., & Jacobs, A. Z. (2024). Algorithmic transparency and participation: Lessons from the U.S. Census Bureau's adoption of differential privacy. *arXiv preprint arXiv:2405.19187*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2405.19187>
2. Andirfa, M., Miswar, Faisal, F., Izzati, Z., & Yusuf, N. (2023). Pengaruh partisipasi anggaran, evaluasi anggaran dan kejelasan tujuan anggaran dana desa terhadap kinerja aparatur pengelolaan dana desa (Studi di Kecamatan Nisam Antara). *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 7(1), 155–168.
3. Anggeli, F. S., & Andayani, A. (2024). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 13(1).
4. Anugrah, K. A., Prabowo, A. A., & Wardani, D. K. (2021). Pengaruh komitmen organisasi perangkat desa dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan whistleblowing system sebagai variabel moderating. *Jurnal Akuntansi Manajerial*, 6(2), 13–28.
5. Ariningsih, Leni “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Sangia Makmur, Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana).” *Profitability: Jurnal Ilmu Manajemen* (2021): 19.
6. Budiarto, DS, Setyaningrum, AD, & Sari, RP (2020). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dan faktor anteseden yang mempengaruhinya . *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 23(2), 145–159.
7. Erlina, R., Rambe, OS, & Rasdianto. (2015). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akruakl . Salemba Empat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*
8. Efendi, N., Setiawan, A. B., & Melani, M. M. (2024). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Pustaka Aktiva (Pusat Akses Kajian Akuntansi, Manajemen, Investasi, dan Valuta)*, 4(1), 30-38.
9. Fitra, H., Syofyan, E., Masdupi, E., Mulyani, E., Taqwa, S., & Halmawati, H. (2024). Pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(2), 1526–1535.
10. Ghozali, I. (2021). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26 (10 th ed.) Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
11. Ghozali, I. (2014). *Structural equation modeling: Metode alternatif dengan partial least square (PLS) (Edisi 4)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
12. Ghozali, I. (2016). Desain Penelitian Kuantitatif Kualitatif untuk Akuntansi, Bisnis dan Ilmu Sosial Lainnya. Semarang: Yoga Pratama.
13. Gujarati, D. N & Dawn. (2010). Dasar-Dasar Ekomometrika. Jakarta: Salemba Empat.
14. Hair, J., Hult, G., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2022a). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) (3nd ed.). SAGE.
15. Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., & Ray, S. (2022b). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) using R: A workbook (p. 197). *Springer Nature*.
16. Indonesia Corruption Watch. (2025). Laporan hasil pemantauan tren korupsi tahun 2024. Indonesia Corruption Watch.
17. Irma, I. (2022). Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmiah Administrasi*, 13(1), 1–13.
18. Jubaedah, Edah, Joni Dawud, Deddy Mulyadi, Nugraha, Haris Faozan, and Putri Wulandari. Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance Di Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Bandung: Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I - LAN, 2008.
19. Lihawa, N. I. P., Noholo, S., & Lukum, A. (2025). Pengaruh transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jambura Accounting Review*, 6(1), 36–50.
20. Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “Goodwill”*, 8(2).
21. Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik (Edisi terbaru). Andi.
22. Matani, C. D., & Hutajulu, L. (2020). Pengaruh kompetensi, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung di Kota Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, 5(3), 21–45.
23. Novaria, R., Nurjannah, S., Abu, MR, Muhdar, A., Mustofa, A., Malik, D., Lestari, A., Abdul, KM, & Rosnani. (2024). Pengantar administrasi publik. Cendikia Mulia Mandiri.
24. Ningsih, W., Arza, F. I., & Sari, V. F. (2020). Analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3517–3532.
25. Sanusi, S., & Riyadi, P. (2023). Pengaruh kompetensi perangkat desa, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi, dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Media Ilmiah Akuntansi*, 11(2), 91–106.

26. Saputra, Y., Sari, M. S., & Warisi, D. (2024). Pengaruh transparansi dan kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *AKUNTANSI* 45, 5(1), 56–70.
27. Saragih, D. P., & Alpi, M. F. (2023). Pengaruh partisipasi masyarakat dan tata kelola terhadap efektivitas pengelolaan dana desa dengan akuntabilitas sebagai variabel intervening. *EKUITAS*, 5(1), 1–10.
28. Saskia, A., Setiawan, A. B., & Anwar, S. (2025). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Kompetensi Aparatur Terhadap Good Governance Pada Dana Kelurahan di Tingkat Kecamatan. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 5(1), 117-130.
29. Setiawan, A. B., Kusuma, I. C., Hambani, S., & Agustin, I. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Aparatur Desa. *Jurnal Akunida*, 8(1), 76-85.
30. Setiawan, A. B., Nuraeni, F., & Kusuma, I. C. (2024). Pengaruh Transparansi Dan Partisipasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa-Desa Di Kecamatan Cisolok Dan Cikakak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 2203-2223.
31. Sentot, A., & Wahjono, SI (2023). Pengantar akuntansi . Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
32. Suci Febriyanti and Halmawati Halmawati, Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Dana Nagari (Studi Pada Nagari Di Kabupaten Agam), *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 2, no. 1 (2020): 2331-2347
33. Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
34. Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
35. Sundari, SI, Astriani, D., & Sujaya, FA (2024). Pengaruh transparansi, kompetensi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kantor desa se-Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang . *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(4), 2726–2742.
36. Soemarso, SR (2018). *Akuntansi: Suatu pengantar* . Jakarta: Salemba Empat.
37. Umam, M. S., Adhivinna, V. V., & Wulandari, M. (2023). Akuntabilitas pengelolaan dana desa Kabupaten Bantul. *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 27–38.
38. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014
39. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
40. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
41. Wea, A., & Rahmadhani, S. (2025). Kinerja pengelolaan dana desa: Dampak partisipasi, evaluasi anggaran, dan kejelasan tujuan. *Pemilik: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 9(2).
42. Widajantie, TD, (2022). Kajian perilaku berdasarkan pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur pengelola dana desa, dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa . *BAJ: Jurnal Akuntansi Perilaku*, 4(2), 415–428.
43. Yasir, M., & Munawaroh, W. S. (2023). Pengaruh partisipasi masyarakat dan kepemimpinan transformasional terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(1), 330–340.
44. Yuesti, A., Dewi, NLPS, & Sudiarta, IP (2020). *Akuntansi sektor publik* . Denpasar: CV. Nuh Aletheia.
45. Zhao, B., Cheng, S., Schiff, KJ, & Kim, Y. (2023). *Digital Transparency and Citizen Participation: Evidence from the City of Sacramento's Online Crowdsourcing Platform*. *Government Information Quarterly*, 40(4), Artikel 101868.